

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Lingga Widi., SE., M.In Tax, Cristine. 2013. *Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Badan Sebelum dan Sesudah Dilakukan Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Dua*. Universitas Indonesia.
- CNN Indonesia. 2016. *Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia tembus lebih dari 60%* available on <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen/>. Diakses pada 27 Agustus 2019
- Effendi, Rizal., & Pujiani, Melli. 2013. *Analisis Efektivitas Penggunaan E-System Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur*. STIE MDP.
- Fajarwati, Riska Noer., Kertahadi., & Kurniawan, Bondan Catur. 2014. *Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama se-Malang Raya)*. Universitas Brawijaya.
- Handayani, Ni Putu Milan Novita dan Noviani, Naniek. 2016. *Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan E-Billing dan E-SPT Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Perpajakan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.15(2): hal. 1001–1028.
- Handayani, Wahyu. 2017. *Pengaruh Penerapan E-Billing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan*. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Surabaya. Vol.3 Issue 4: hal. 102-115.
- Husnurrosyidah, & Suhadi. 2017. *Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus*. STAIN Kudus.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, APBN 2018, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018/>, pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 22.45 WIB.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, MPN G2, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/mpn-g2/>, pada tanggal 9 September 2018 pukul 20.10 WIB
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, diakses dari <https://www.pajak.go.id/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2013>, pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 20.25 WIB.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, *Cara Baru Bayar Pajak, Lebih Mudah, Lebih Cepat*, 2013, hlm. 3.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, diakses dari <https://www.slideshare.net/ariefdjunaedi17/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2013-tentang-pph-atas-usaha>, pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 00.48

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik, diakses dari <https://www.pajak.go.id/>, pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 01.30 WIB

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-06/PJ/2016 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak, diakses dari <https://www.pajak.go.id/>, pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 01.50 WIB

*Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan (Tim Reformasi)*. 2016. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK, 010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. 2016. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak*. 2010. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak*. 2014. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.* 2014. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.* 2013. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Permata, Desti Intan. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas.* Universitas Diponegoro

Rumainum, Ance Iriani. 2015. *Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan e-SPT (Studi Pada KPP Pratama Kepanjen.* Universitas Muhammadiyah Malang.

S, Dahlan Hadyan. 2017. *Pengaruh Penerapan System E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang.*

*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* 1983. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.* 2017. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

*Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.* 2008. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Widjaja, Helen., & Siagian, Arthur Jaya. 2017. *Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.* Universitas Tarumanagara.

Wulandari, Putri. 2018. *Analisis Perbedaan Tingkat Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak Masa PPh 21 Sebelum dan Sesudah Diterapkan e-Billing System (Studi Pada KPP Pratama Padang Dua).* Universitas Andalas.